

DINAMIKA AKTOR DALAM PERSIAPAN PEMEKARAN DAERAH BALANIPA

The Dynamics of Actors in Preparation for Balanipa Area Expansion

Nurul Fibrianti

Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

email: lhulu.fibrianti@gmail.com

Abstract

Expansion area is considered as an appropriate solution to accelerate development and increase regional prosperity. The research aims to describe and analysis the dynamics of among the actors of local politician in preparing the regional expanding of new autonomy of region of Balanipa. The writer used the concepts of decentralization and regional autonomy, concept of the formation of New Autonomy Regency (NAR), concept of elite theory and concept of conflict theory. The method used was qualitative and with analysis descriptive approach. The research was conducted in Polewali Mandar regency as a mother region. The data were collected with interview, field observation. Library Studi, then the data were analyzed and concluded with data reduction technique. The results indicate the occurrence of dynamics between political actors take place in expansion preparation of regency candidate of Balanipa. Dynamics occurs at the level of the internal actor executives, legislative, public figures and between political actors. But behind the conflict eventually leads to a consensus (agreement) is to jointly agree on the existence of Balanipa expansion. The occurrence of dynamics influenced by five factors i.e. historical factors of Balanipa, public welfare improvement, actors' willing to be adopted as public figures, the interest to gain power and promise of the campaign prior to the election implementation.

Key words : Expansion, Actors, Conflict

Abstrak

Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi tepat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika yang terjadi antar aktor politik lokal dalam persiapan pemekaran Daerah Otonomi Baru Balanipa. Penulis menggunakan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, konsep Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), konsep teori elit dan konsep teori konflik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar selaku daerah induk. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan dan studi pustaka. Data dianalisis dan disimpulkan menggunakan teknik reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan dua hal yaitu pertama, terjadi dinamika antar aktor politik dalam persiapan pemekaran calon Kabupaten Balanipa. Dinamika terjadi pada tataran internal aktor eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat dan antar aktor politik. Tapi dibalik konflik yang terjadi pada akhirnya berujung pada suatu konsensus (keepakatan) yaitu dengan secara bersama-sama menyetujui adanya pemekaran Balanipa. Kedua, terjadinya dinamika dipengaruhi oleh lima pertimbangan substansial yaitu faktor historis Balanipa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keinginan aktor untuk ditokohkan, kepentingan memperoleh kekuasaan dan janji kampanye menjelang pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci : Pemekaran, Aktor, Konflik

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah salah satu produk yang secara konseptual memberikan perubahan pada model dan paradigma pemerintahan daerah. Efisiensi struktural (*structural efficiency*) yang menekankan pada model efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal kini tak berlaku lagi. Saat ini dikembangkan model demokrasi lokal (*local democracy*) yang

menekankan nilai demokrasi dan keberagaman penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pergeseran model tersebut juga berdampak pada pergeseran dari penekanan aspek sentralisasi menjadi penekanan aspek desentralisasi.

Salah satu yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi tepat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah melalui peningkatan kualitas dan kemudahan dalam melayani masyarakat. Selain itu pemekaran merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Muzawwir, 2008).

Pemekaran atau *fragmentasi* administratif, merupakan bagian integral dari proses desentralisasi dan otonomi daerah. Materi tentang Pemekaran daerah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 32 sampai pada pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah telah menciptakan kesempatan dalam pembentukan daerah otonomi baru. Pertumbuhan jumlah daerah otonomi baru di Indonesia sendiri paling tinggi dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data Kemendagri dari tahun 1999-2014 tercatat 223 daerah otonomi baru yang terdiri dari 8 provinsi, 182 Kabupaten dan 33 Kotamadya yang terbentuk. Pada tahun 2015 Kemendagri menerima 114 usulan pemekaran daerah otonomi baru dari masyarakat dan 87 usulan daerah otonom dari DPR jadi jika dijumlahkan saat ini terdapat 201 usulan pemekaran daerah otonom baru.

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang terbentuk di era reformasi. Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan ini terbentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan Undang-undang No.26 tahun 2004. Provinsi Sulawesi Barat saat ini terdiri dari 6 kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Secara geografis luas wilayah Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km², dengan wilayah yang cukup luas dan persebaran penduduk di setiap daerah membuat pelayanan publik tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2014 melalui undang-undang No.4 Tahun 2013, Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah membuat pelayanan publik di daerah ini menjadi lebih efektif dan efisien, pemanfaatan sumber daya alam daerah yang semakin baik serta terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Kondisi ini pula yang diharapkan oleh masyarakat Balanipa, adanya pembentukan daerah otonomi baru yang terpisah dari Kabupaten Polewali Mandar sebagai solusi atas sulitnya masyarakat mendapatkan akses pelayanan prima yang efisien. Belum meratanya pelayanan pemerintah yang didapatkan serta lambatnya pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan menguatnya wacana pemekaran daerah Balanipa sebagai daerah otonomi baru.

Pemekaran daerah Balanipa mendapat dukungan besar dari lapisan masyarakat setempat. Secara resmi, ide pembentukan kabupaten Balanipa bergulir pada November 2007, yang ditandai dengan lahirnya Komite Aksi Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa (KAPP Balanipa) di Tinambung. Proses perjuangan pemekaran Balanipa juga mendapat dukungan dari *stakeholder* di tingkat Kabupaten Polewali Mandar dan di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil penelitian Ilham Jamaluddin, proses pemekaran Balanipa telah memenuhi 4 persetujuan pada tahap administratif yaitu surat keputusan persetujuan pemekaran Balanipa oleh Bupati Polewali Mandar, DPRD Polewali Mandar, Gubernur Sulawesi Barat dan DPRD Sulawesi Barat (Jamaluddin, 2014).

Proses penetapan keputusan persetujuan pemekaran Balanipa diwarnai oleh berbagai kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat dan tarik menarik kepentingan oleh pengusul dan pemerintah. Ide untuk memekarkan Balanipa juga tak didukung oleh semua pihak, salah satunya oleh Salim S. Mengga yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat. Menurut Salim, kesiapan daerah Balanipa untuk menjadi daerah otonomi baru masih dianggap minim dibandingkan dengan daerah yang lain.

Pemekaran daerah Balanipa menjadi suatu dinamika yang unik dalam pengimplementasian desentralisasi di Sulawesi Barat. Desentralisasi dan pemekaran terlalu sering dipandang sebagai mekanisme bebas masalah dari pembaharuan pemerintahan. Bagian dari suatu transisi menuju struktur-struktur tata pemerintahan yang sudah ditetapkan di muka dan yang menyumbang pada pembangunan, demokrasi, masyarakat sipil, dan good governance (Roth, 2007). Begitu pula aktor-aktor politik lokal cenderung mengemas proses-proses yang kompleks dan memainkan peran demi terwujudnya suatu kepentingan yang didasarkan pada visi dan misi pembangunan dan berakar pada aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Penelitian akan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika antar aktor politik lokal dalam persiapan pemekaran calon kabupaten Balanipa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan dasar penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menyelidiki secara lebih mendalam/terfokus atas suatu fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang menggambarkan secara mendalam tentang situasi, atau proses yang menggambarkan peran aktor dalam proses pemekaran Kabupaten Balanipa menjadi daerah otonom.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dengan memusatkan pada beberapa tempat yaitu 7 kecamatan calon Kabupaten Balanipa, kantor DPRD Polewali Mandar dan kantor Bupati Polewali Mandar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, (1) wawancara, yaitu dengan berdialog secara mendalam kepada informan. Penulis melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Balanipa. (2) Pengamatan Lapangan (*observasi partisipatory*) yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penulis mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada elit-elit lokal terkait dinamika dalam proses pemekaran Balanipa. (3) Studi Pustaka (*library research*), penulis gunakan untuk penelusuran data adalah dengan menggunakan teknik studi pustaka baik dalam bentuk berita, artikel, hasil kajian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis melalui tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Penggunaan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara riil dari berbagai masalah yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemekaran daerah Balanipa menjadi sebuah kabupaten didasari oleh landasan historis yang kuat yaitu Balanipa merupakan kerajaan terbesar di tanah Mandar. Di tanah Sulawesi (Sulawesi Selatan dan Barat) dulunya berdiri 4 kerajaan besar yaitu kerajaan Gowa, Luwu, Bone dan Mandar. Kerajaan di Mandar sendiri terbagi ke dalam 14 kerajaan (*Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga*), dan Kerajaan Balanipa dianggap sebagai Bapak (*ama'*) kerajaan (pusat). Diantara 4 kerajaan terbesar masing-masing sudah menjadi sebuah

kabupaten kecuali Balanipa, karena itu keinginan untuk membentuk Balanipa menjadi sebuah Kabupaten semakin kuat diperjuangkan.

Proses perjuangan pemekaran daerah Balanipa sehingga dapat menjalankan pemerintahan sendiri telah berlangsung selama 10 tahun sejak KAPP (Komite Aksi Percepatan Pembentukan) Kabupaten Balanipa dibentuk pada tahun 2007 silam. Pembentukan daerah otonomi baru Balanipa saat ini masuk ke dalam kelompok 19 daerah yang akan dimekarkan di Indonesia. Pembentukan calon kabupaten Balanipa telah melewati serangkaian proses untuk pemenuhan syarat administratif. Persetujuan dalam pemenuhan syarat pun telah dikeluarkan oleh DPRD kabupaten Polewali Mandar, Bupati Kabupaten Polewali Mandar, DPRD provinsi Sulawesi Barat dan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Pemenuhan syarat administratif dengan melibatkan banyak pihak tentunya merupakan hal yang rumit. Untuk memenuhi syarat tersebut tidak hanya berjalan pada tataran administrasi pemerintahan, tetapi praktik politik yang dinamis juga berperan di dalamnya. Terjadi tarik ulur kepentingan, perbedaan pendapat, tawar menawar politik oleh aktor-aktor politik serta konsesus politik. Perbedaan pendapat dan tarik ulur ini terjadi baik, pada tataran internal yaitu aktor politik legislatif, aktor politik eksekutif dan tokoh masyarakat, juga terjadi pada eksternal yaitu antara aktor legislatif, eksekutif dan tokoh masyarakat.

Pemekaran calon kabupaten Balanipa saat ini telah mendapatkan “satu suara” dukungan dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Dalam prosesnya antara aktor Eksekutif dan legislatif di Polewali Mandar dianggap telah kompak untuk mendukung adanya pemekaran. Kekompakan ini juga dapat terlihat dengan dikeluarkannya keputusan-keputusan yang menyetujui pembentukan calon kabupaten Balanipa melalui pemekaran.

Meskipun dianggap selalu berjalan selaras dalam mewujudkan pemekaran kabupaten Balanipa riak-riak juga sempat muncul dalam proses penetapan surat keputusan pemekaran Balanipa. Surat Keputusan pertama yang dikeluarkan oleh DPRD Polewali Mandar pada tahun 2008, menurut pihak eksekutif hanya sebagai surat persetujuan dan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan surat keputusan baru dilakukan pada tahun 2009 dengan mengikuti peraturan yang berlaku, perbaikan antara surat keputusan yang pertama dan kedua terkesan lambat. Surat keputusan yang ditetapkan baik oleh eksekutif maupun legislatif mengalami rekondisi masing-masing sebanyak empat kali dengan waktu rekondisi yang cenderung lambat.

Proses pemekaran Balanipa dari tahun 2007 sampai tahun 2014 berada pada kepemimpinan Bupati Ali Baal Masdar. Dalam prosesnya peran Ali Baal Masdar terkesan lebih dominan terhadap pemekaran dibanding peran oleh lembaga legislatif DPRD Polewali

Mandar. Seperti dalam penentuan letak lokasi ibukota Balanipa, ide dan pikiran Ali Baal Masdar yang menghendaki untuk titik lokasi ibukota berada di daerah Palippis. Palippis dianggap sebagai daerah strategis untuk menjadi ibukota Kabupaten dengan kontur tanah yang berbukit dan didukung oleh keindahan alam pantai Palippis. Namun, penentuan titik lokasi ibukota calon kabupaten Balanipa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan pemerintah karena lokasinya berada pada dua kecamatan yang berbeda.

Letak lokasi ibukota yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah akhirnya diubah melalui rapat paripurna oleh DPRD Polewali Mandar pada tanggal 22 Agustus 2013 yang membahas penetapan ibukota calon kabupaten Balanipa dilakukan melalui voting. Jalur voting untuk menentukan ibukota ditempuh karena adanya perbedaan pendapat dari pihak eksekutif dalam hal ini Camat Balanipa yang tidak setuju penetapan Desa Laliko Kecamatan Campalagian ditetapkan sebagai ibukota calon kabupaten Balanipa. Karim, Camat Balanipa berpendapat bahwa daerah yang dipimpinnya juga layak dan siap untuk menjadi ibukota calon DOB Balanipa. Pendapat camat Balanipa tersebut juga ternyata mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD.

Pada tahun 2014 terjadi pergantian pimpinan (kepala daerah) di Kabupaten Polewali Mandar, Ali Baal Masdar yang telah memimpin selama 2 periode menyerahkan tampuk kekuasaan sebagai Bupati Polewali Mandar kepada adik kandungnya Andi Ibrahim Masdar yang terpilih melalui Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013. Dibawah kepemimpinan Andi Ibrahim Masdar sikap saling tuding kembali mewarnai proses pembentukan calon Kabupaten Balanipa. Dalam rapat dengar pendapat antara pihak pemerintah Polewali Mandar, DPRD Polewali Mandar dan KAPP Kabupaten Balanipa di Kantor DPRD Polewali Mandar, salah satu anggota DPRD menuding bahwa Bupati Polewali Mandar saat ini, Andi Ibrahim masih setengah hati untuk melepas 7 kecamatan calon kabupaten Balanipa. Tudingan ini dikarenakan banyaknya suara-suara sumbang yang menyatakan bahwa Andi Ibrahim Masdar tidak mendukung penuh terwujudnya pemekaran Balanipa. Tapi tudingan ini pun akhirnya ditepis oleh pemerintah (Eksekutif) Polewali Mandar.

Dinamika tak hanya terjadi antara aktor eksekutif dan aktor legislatif, dinamika yang sama juga terjadi antara pihak eksekutif dan tokoh atau elit yang bersama memperjuangkan Balanipa. Kendala pada pemekaran Balanipa ditengarai karena masih adanya pihak yang tidak menghendaki pemekaran tersebut. Salah satu yang tidak mendukung adanya pemekaran Balanipa adalah Salim S.Mengga. Sikap Salim S.Mengga yang merupakan anggota DPR RI dapil Sulawesi Barat mengecewakan banyak pihak, termasuk pemerintah kabupaten Polewali

Mandar. Tidak setujunya Salim S. Mengga dengan adanya pemekaran Balanipa ditengarai karena faktor ketersinggungan. Hal tersebut muncul karena pihak-pihak yang memperjuangkan pemekaran Balanipa dianggap tidak melibatkannya secara langsung.

Dalam berbagai kasus pemekaran di Indonesia, kendala biasanya terjadi pada level pemerintah provinsi induk. Biasanya pemerintah provinsi induk baik dari eksekutif maupun legislatif akan menghalangi atau memperlambat proses pemekaran dengan tidak mengeluarkan persetujuan. Beda halnya dengan pemekaran Balanipa, pemerintah provinsi induk yaitu pemerintah provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh untuk terbentuknya calon daerah otonomi baru Balanipa. Penetapan persetujuan melalui surat keputusan baik oleh Gubernur Sulawesi Barat maupun DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak menimbulkan riak-riak yang dapat menjadi kendala pemekaran.

Dalam kedinamisan politik merupakan hal yang wajar ketika ada yang aktor berbeda pendapat, saling tarik menarik kepentingan bahkan berkonflik untuk mencapai keinginannya. Dibalik dinamika yang terjadi, tentunya terdapat penyebab yang melatar belakangnya. Dinamika antar aktor politik lokal yang terjadi dalam proses pemekaran Balanipa, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis disebabkan oleh 5 hal yaitu (1) Historis Kerajaan Balanipa, (2) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, (3) Pencitraan tokoh politik lokal, (4) Keinginan untuk memperoleh kekuasaan dan (5) Janji Kampanye kepada masyarakat menjelang Pemilu.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat, tarik menarik kepentingan serta terobosan-terobosan yang dilakukan oleh aktor politik dalam proses pemenuhan syarat administratif persiapan pemekaran Balanipa. Dinamika yang terjadi tak hanya antar aktor eksekutif (pemerintah daerah Polewali Mandar), antar aktor di lembaga legislatif dan antar elit-elit yang mengaku memperjuangkan pemekaran. Dinamika yang serupa juga terjadi antar aktor politik yaitu eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Smith dalam Nas (2007), desentralisasi merupakan proses melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dengan syarat terdapat pendelegasian kekuasaan (*power*) kepada pemerintah bawahan dan pembagian kekuasaan kepada daerah. Sistem desentralisasi berdampak pada munculnya tokoh-tokoh dalam sebuah proses politik seperti pemekaran daerah merupakan perilaku politik yang ditunjukkan oleh mereka yang menganggap dirinya memiliki pengaruh. Dalam proses politik tokoh tersebut disebut aktor,

Dan Nimmo menyebut kriteria aktor politik adalah orang yang berbicara tentang politik atau dalam setting politik, seperti politikus, profesional dan aktivis (Nimmo, 2004). Faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri.

Semakin menjamurnya elit-elit lokal di Sulawesi Barat berawal ketika pemekaran provinsi Sulawesi Barat dapat diwujudkan pada tahun 2004. Pemekaran Provinsi Sulawesi Barat membuat terbukanya lapangan pekerjaan baru dan pertumbuhan spesialisasi jabatan, baik jabatan dalam pemerintahan maupun politik. Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh penduduk di luar daerah Sulawesi Barat untuk bermigrasi ke provinsi baru dengan harapan meningkatkan taraf hidup.

Tingginya pertumbuhan penduduk serta banyaknya lowongan jabatan berdampak pada kaum elite semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom. Pengimplementasian asas desentralisasi melalui sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah bebas untuk mengurus rumah tangga daerahnya. Sistem otonomi daerah juga membuat banyaknya daerah yang ingin membentuk pemerintahan sendiri dengan mengatasnamakan kemakmuran rakyat melalui jalan pemekaran daerah.

Aktor yang muncul pada proses pemekaran Balanipa, merupakan elit-elit lokal daerah yang kini peranannya dalam politik di tataran daerah maupun nasional telah cukup diperhitungkan. Anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan tersebut pada gilirannya akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok elite (Haryanto, 2005). Setelah sistem otonomi daerah berlaku di Indonesia, elit-elit politik di tingkat lokal semakin menjamur. Euforia masyarakat lokal yang ingin mendapatkan kepentingan melalui kekuasaan merupakan imbas dari sistem pemerintahan sentralisasi, dimana masyarakat lokal hanya dapat menunggu keputusan dari sang penguasa di pusat.

Terdapat empat proses sosial utama yang mendorong perkembangan elite yakni: (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi, (4) perkembangan keragaman moral (Keller, 1995). Konsekuensinya, kaum elite pun semakin banyak, semakin beragam, dan lebih bersifat otonom. Pengimplementasian asas desentralisasi melalui sistem otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah bebas untuk mengurus rumah tangga daerahnya. Sistem otonomi daerah juga membuat banyaknya daerah yang ingin membentuk pemerintahan sendiri dengan mengatasnamakan kemakmuran rakyat melalui jalan pemekaran daerah.

Aktor-aktor pejuang pemekaran yang bermunculan selain karena jabatan yang mengharuskan untuk terlibat juga karena faktor kepentingan para aktor. Banyaknya aktor dan kelompok kepentingan yang bermunculan berimbas pada semakin beragamnya pendapat dan kepentingan yang akhirnya menimbulkan dinamika antar aktor. Dinamika atau konflik yang terjadi antar aktor pada kasus pemekaran Balanipa sampai saat ini hanya berada pada level konflik yang ringan. Konflik yang terjadi hanya pada seputar perbedaan pendapat antar aktor, persaingan antar individu dan antar kelompok kepentingan dan tarik menarik kepentingan.

Baik aktor maupun kelompok-kelompok yang muncul berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya persaingan, perdebatan dan perbedaan pendapat oleh aktor-aktor. Namun, dalam konflik yang terjadi ada satu tujuan yang sama yaitu terwujudnya pembentukan kabupaten Balanipa. Tujuan yang sama inilah melahirkan konsensus atau kesepakatan dalam pemekaran Balanipa yaitu satu suara dan satu gerakan demi terwujudnya pemekaran yang diperjuangkan. Situasi konflik yang terjadi pada pemekaran Balanipa selaras dengan yang diungkapkan oleh Dahendorf, menurutnya Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju ke arah kesepakatan atau *konsensus* (Poloma, 2000) .

Konflik pada kasus pemekaran Balanipa berujung pada kesepakatan karena pihak-pihak yang berkonflik dapat satu suara melalui kompromi yang dibangun, pada umumnya kesepakatan melalui kompromi akan terjalin apabila masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Menurut Conn dalam Surbakti (1992), situasi konflik termasuk pada konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik menang-menang ialah suatu situasi konflik yang mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik tersebut biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya dinamika antar aktor dalam proses pembentukan calon kabupaten Balanipa dilatar belakangi oleh 5 faktor. Dari kelima faktor yang menjadi pertimbangan aktor untuk mendorong pemekaran calon Kabupaten Balanipa, faktor historis Balanipa menjadi pertimbangan aktor yang paling dominan untuk mendorong terwujudnya pemekaran. Balanipa yang dulunya merupakan pusat kerajaan-kerajaan di mandar menjadi alasan utama munculnya ide pemekaran Balanipa menjadi sebuah kabupaten.

Empat faktor yang lainnya juga sama berpengaruhnya dengan faktor historis Balanipa. Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari adanya pemekaran

wilayah, dengan pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif serta anggaran pembangunan daerah yang tepat sasaran maka peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat akan terciptanya dengan sendirinya.

Namun dibalik proses persiapan pemekaran Balanipa kepentingan elitis menutupi faktor historis Balanipa yang merupakan cikal bakal lahirnya ide pemekaran . Aktor-aktor politik di Sulawesi Barat memainkan berbagai macam peran dalam proses pemekaran calon Kabupaten Balanipa agar kepentingan pribadinya dapat terwujud. Perbedaan pendapat soal siapa yang layak untuk menduduki posisi tertentu tercermin bahwa aktor-aktor tersebut hanya mempromosikan dirinya. Untuk mendapatkan tampuk kekuasaan yang lebih tinggi aktor-aktor politik di Sulawesi Barat pun tak lupa untuk menjadikan wacana pemekaran Balanipa sehingga dapat meraih simpati masyarakat dan sebagai pemulus untuk mewujudkan kepentingannya.

KESIMPULAN

Persiapan pemekaran daerah Balanipa diwarnai oleh dinamika antar aktor politik lokal. Dinamika yang terjadi tak hanya pada internal aktor politik yaitu eksekutif, legislatif maupun tokoh masyarakat, dinamika juga terjadi pada tataran eksternal antar aktor yaitu antara aktor eksekutif dan legislatif, antara aktor eksekutif dan tokoh masyarakat juga antara aktor politik legislatif dan tokoh masyarakat. Tapi dibalik dinamika yang terjadi pada akhirnya menghasilkan suatu konsensus (kesepakatan) yaitu dengan secara bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Balanipa. Terjadinya dinamika dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor historis Balanipa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keinginan aktor untuk ditokohkan, kepentingan memperoleh kekuasaan dan janji kampanye menjelang pelaksanaan pemilu. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya dinamika antar aktor dalam persiapan pemekaran Balanipa dapat dihindari dengan mengutamakan faktor peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat, pelayanan publik dan pembangunan daerah sebagai landasan untuk terwujudnya pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta : PLOD-JIP Fisipol Universitas Gajah Mada
- Jamaluddin, I. (2014). *Pembentukan Daerah Otonomi Baru : Studi tentang Rencana Pembentukan Balanipa* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin
- Keller S. (1995). *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzawwir A. (2008). *Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara* (Tesis). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Nas, Jayadi. (2007). *Konflik Elite di Sulawesi Selatan*, Jakarta: Yayasan Massaile Jakarta bekerja sama dengan LEPHAS
- Nimmo D.(2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Rosdakarya
- Poloma M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali
- Roth D. (2007). *Gubernur Banyak, Provinsi Tak Ada : Berebut Provinsi di Daerah Luwu-Tana Toraja di Sulawesi Selatan*. Jakarta : Buku Obor
- Surbakti R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia.